

Digitalisasi UMKM: Strategi Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bontang

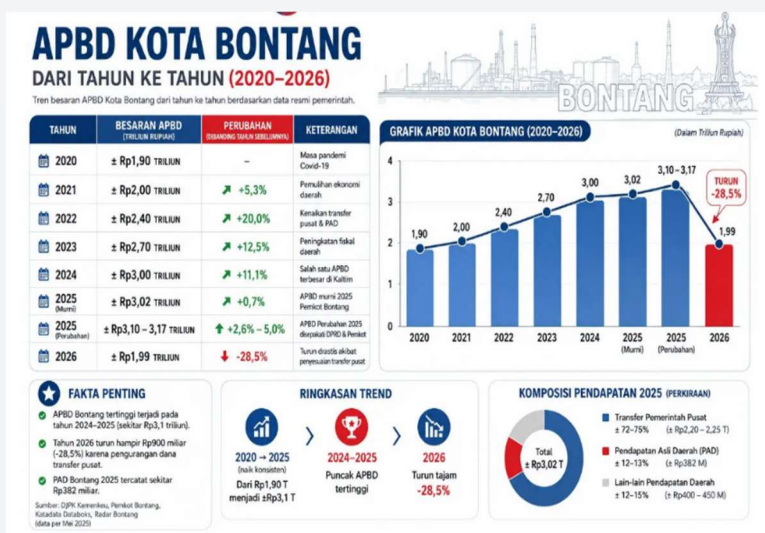
Muhamad Nur Hidayad, M. Pd (Penelaah Teknis Kebijakan, Sekretariat Daerah Kota Bontang)

Ditujukan Kepada: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang

Ringkasan Eksekutif

Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Bontang membuat Pemerintah harus memutar otak agar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah bisa meningkat. UMKM yang disebut-sebut sebagai tulang punggung ekonomi menjadi objek strategis yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan APBD Pemerintah Kota Bontang. Akan tetapi, di era digital seperti saat ini, jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi digital masih sangat sedikit. Oleh karena itu, *Policy Brief* ini merekomendasikan beberapa kebijakan, diantaranya melakukan penguatan literasi digital bagi UMKM, membuat *digital service center*, dan melakukan skema sharing pembiayaan dengan perusahaan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah bisa terwujud.

Pendahuluan



Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dari 3, 17 triliun di tahun 2025 menjadi hanya Rp 1,99 triliun di tahun 2026 menimbulkan resiko fiskal yang serius. Faktor penyebab turunnya APBD Kota Bontang tersebut adalah berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang harus segera mencari sumber pendapatan alternatif.

Dalam konteks Pembangunan ekonomi lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan sebagai tulang punggung ekonomi (OECD, 2023; World Bank, 2024). Namun, di era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM lokal masih rendah. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Komdigi, 2025) menunjukkan skor pemberdayaan hanya 34,42.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan data dan fakta uraian sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan utama untuk mengoptimalkan peran UMKM sebagai motor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

1. Rendahnya Literasi Digital

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), skor Pemberdayaan memiliki nilai yang paling rendah (34,42). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masih rendah. Itu artinya, masih banyak UMKM yang belum mampu memanfaatkan e-commerce dan pemasaran digital.



Diolah dari data Kementerian Komunikasi dan Digital

2. Keterbatasan Anggaran

Penurunan APBD Kota Bontang dari Rp 3,17 triliun (2025) menjadi Rp 1,99 triliun (2026) menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Kondisi ini tentu mempengaruhi Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan alokasi dana untuk pembinaan intensif bagi ribuan UMKM. Dengan kata lain, penurunan APBD membatasi dukungan pemerintah terhadap transformasi UMKM. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak diatasi, kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah akan stagnan, dan ketergantungan pada transfer pusat semakin tinggi.

Alternatif Solusi

Policy Brief ini menawarkan sejumlah alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan transformasi UMKM untuk meningkatkan pendapatan daerah.

1. Penguatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM

Sebagai langkah strategis untuk melakukan transformasi UMKM tentu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar memahami dan mengerti tentang penggunaan teknologi untuk memasarkan produk UMKM yang dimiliki dan meningkatkan pendapatan. Program ini harus didesain secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan tentang e-commerce dan pemasaran digital. Selain meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, pelatihan ini juga dapat diakhiri dengan sertifikasi kompetensi digital sebagai bentuk pengakuan resmi bagi UMKM yang telah siap bersaing di pasar digital.

2. Pembentukan *Digital Service Center*

Digital Service Center difungsikan sebagai pusat layanan terpadu bagi UMKM. Fasilitas ini berfungsi sebagai ruang konsultasi, pendampingan teknis, dan inkubasi inovasi. Dengan adanya pusat layanan digital, UMKM dapat memperoleh solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses digitalisasi, sekaligus membangun jejaring dengan perguruan tinggi dan komunitas bisnis.

3. Skema *Sharing* Pembiayaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa keterbatasan fiskal tidak memungkinkan Pemerintah untuk membiayai seluruh pelatihan bagi UMKM. Oleh karena itu Skema *Sharing* Pembiayaan dengan Perusahaan menjadi alternatif yang bisa diambil mengingat di Kota Bontang terdapat dua raksasa perusahaan, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG serta beberapa perusahaan besar lainnya. Dengan metode Skema *Sharing* ini, pemerintah tidak perlu menggelontorkan dana besar untuk melatih UMKM agar bisa bertransformasi.

No.	Alternatif Solusi	Efektifitas	Biaya	Kemudahan Implementasi	Resiko	Keberlanjutan
1	Penguatan Literasi Digital	Tinggi	Rendah	Mudah	Rendah	Tinggi
2	Pembentukan <i>Digital Service Center</i>	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

3	Skema Sharing Pembiayaan	Tinggi	Rendah (Bagi Pemkot)	Mudah	Rendah	Tinggi
---	--------------------------	--------	----------------------	-------	--------	--------

Rekomendasi

Berdasarkan analisis masalah dan alternatif solusi, terdapat tiga langkah prioritas yang perlu segera diambil oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

1. Penguatan literasi digital UMKM → biaya rendah, dampak tinggi.
2. Pembentukan Digital Service Center → memastikan keberlanjutan proses digitalisasi.
3. Skema CSR bersama perusahaan besar → menjamin pembiayaan berkelanjutan tanpa membebani APBD.

Dengan menempatkan literasi digital sebagai langkah awal, didukung oleh *Digital Service Center* sebagai infrastruktur pendamping, serta skema CSR sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi UMKM di Kota Bontang dapat segera terwujud. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Daftar Pustaka

- OECD. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.
- World Bank. (2024). *Digital Development Report*. Washington DC: World Bank.
- Komdigi. (2025). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025*. Jakarta: Komdigi.
- BPS Kota Bontang. (2025). *Kota Bontang Dalam Angka 2025*. Bontang: BPS.